

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA TERHADAP INFRASTRUKTUR JALAN
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015**

Hesti Larasani ¹⁾, Drs. H. Isril, MH ²⁾

Email: hestilarasani10@yahoo.com ¹⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Panam Jl. Hr. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab keberhasilan pembangunan jalan di kecamatan Pangean (Teluk Pauh) tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi kendala dalam keberhasilan infrastruktur jalan di Kecamatan Pangean (Teluk Pauh) Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Terhadap Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 memperlihatkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Teluk Pauh Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini terlihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai kepada pemanfaatannya oleh masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya infrastruktur jalan juga memberikan sumbangan besar dalam memperbaiki Infrastruktur dan kualitas jalan di Desa Teluk Pauh Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : *Pemerintahan PU Bidang Bina Marga, Infrastruktur Jalan*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan prasarana jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial budaya, yang titik beratnya untuk meningkatkan layanan arus distribusi barang, jasa dan juga bagi pengguna jalan. Pembangunan prasarana jalan yang telah diupayakan

selama ini meliputi peningkatan dan pengaspalan jalan, rehabilitasi jalan serta pembangunan jalan-jalan baru yang diprioritaskan untuk kelancaran transportasi darat, serta membuka daerah-daerah terisolir. Pembangunan prasarana jalan yang mempunyai peranan dalam mendukung kelancaran arus pengguna jalan. Sistem jaringan jalan yang efisien dapat menurunkan biaya transportasi, mobilitas, aksesibilitas, dan pelayanan.

Untuk itu dalam pengembangan jaringan jalan dilakukan dengan cara meminimumkan jumlah biaya konstruksi, serta dalam penggunaan sumber daya dan dana harus efisien. Oleh karena itu, sebagai pelaksanaan pembangunan yaitu organisasi sektor publik dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pembangunan jalan hendaknya melakukan suatu pengukuran. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan, memberdayakan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah terutama di desa Teluk Pauh. Oleh karena itu, manajemen pemerintah harus mencerminkan penguasaan yang baik yang memperhatikan pengembangan pembangunan suatu daerah.

Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat lima belas kecamatan yang dilalui pembangunan jalan yaitu kecamatan Pangean, Benai, Cerenti, Gunung Toar, Hulu Kuantan, Inuman, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, Logas Tanah Darat, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, dan Sentajo Raya. Pada Penelitian ini peneliti hanya berfokus pada satu kecamatan yaitu kecamatan Pangean.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu

Dinas yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Pemerintahan inti merupakan Dinas yang bertugas untuk memberikan pelayanan dalam hal penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Pemerintah, seperti pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Pangean. Berdasarkan wilayah kerjanya, Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu Dinas yang memiliki peranan penting terhadap pembangunan dan peningkatan jalan. Fasilitas umum yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan perekonomian warga.

Dari sisi pengeluaran Bidang Bina Marga yang bersifat terperinci dan pada sisi lain terdapat kendala kemampuan finansial, maka masalah efisiensi dan efektivitas pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi sangat penting.

Meskipun demikian keberhasilan Bidang Bina Marga masih banyak mengalami kendala-kendala yang dihadapi tidak hanya dari segi anggaran tetapi dari segi masyarakat pun perlu di pertimbangkan, karena masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan yang memungkinkan tercapainya pembangunan secara optimal. Banyak sekali desa yang akan dilakukan pembangunan oleh pemerintah daerah tetapi tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan sebagian masyarakat desa tidak mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yang

menghambat terlaksananya pembangunan jalan adalah penolakan pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya karena masyarakat masih memanfaatkan lahan tanahnya untuk berkebun. Selain itu proses pembangunan jalan juga cukup lama, parit-parit juga tidak ada sehingga sangat berpengaruh terhadap penggenangan air jika terjadi hujan.

Seharusnya dari berbagai proyek yang dilaksanakan oleh pekerjaan umum setiap tahunnya menjadi lebih respon terhadap masalah yang dihadapi terhadap masyarakat seperti pembebasan tanah milik masyarakat yang langsung di tangani oleh Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah daerah juga melakukan pendekatan untuk meningkatkan kepercayaan, saling ketergantungan, dan memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul : “Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga terhadap Infrastruktur Jalan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala pada masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan

Pangean (Teluk Pauh) tahun 2015?

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Pangean (Teluk Pauh) Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, penulis dalam melaksanakan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab keberhasilan pembangunan jalan di kecamatan Pangean (Teluk Pauh) tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi pendukung dalam keberhasilan infrastruktur jalan di Kecamatan Pangean (Teluk Pauh) Tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang politik dan sosial terutama mengenai revolusi masyarakat dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum terhadap pembangunan jalan. Dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna memperbaiki mutu pendidikan sosial dan politik serta untuk memperkaya teori-teorinya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrument maupun bahan

kritikan serta masukan bagi pihak yang berwenang dalam hal revolusi masyarakat terhadap pembangunan jalan Kecamatan agar lebih ketat dalam pengawasan dan pelaksanaan.

2. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Kewenangan Pemerintahan.

Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan “*macht*” (Belanda). Dari kedua istilah ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua istilah ini tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita. Hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian aparatur dan pejabat penyelenggaraan negara atau pemerintahan kedua istilah tersebut tidaklah begitu penting untuk dipersoalkan. Padahal dalam konsep hukum tata Negara dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek (1985:26) menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi (*het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*).

Menurut P. Nicolai (1994:4), wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen is handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan*). Menurut Bagir Manan (2004:66) organisasi tidak lain dari kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan atau lingkungan kerja tetap tersebut akan mencerminkan tujuan organisasi.

Selanjutnya, dapat dikemukakan bahwa jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang atau pemangku jabatan atau pejabat pemerintahan itu (*ambtsdrager*) silih berganti. Dalam konsep hukum tata negara, hal itu menjadi kelaziman oleh karena memungkinkan fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan pada jabatan itu dapat teraksana. Apalagi dianut prinsip, bahwa tidak ada jabatan seumur hidup atau terdapat pembatasan masa jabatan sehingga harus terjadi pergantian pemangku jabatan agar tidak terjadi kekosongan jabatan guna menjalankan fungsi-fungsi yang melekat pada jabatan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, harus ada sebuah pranata yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan melakukan

sebuah proses pengisian jabatan (Aminuddin Ilmar, 2014).

B. Pengertian Organisasi

Organisasi secara umum sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Luther Gulick mengatakan bahwa organisasi sebagai suatu alat penghubung satuan-satuan kerja yang memberikan meraka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha (Syafiie, 2013).

C. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Menurut George R. Terry, Pengertian Manajemen adalah suatu proses yang khas, dimana terdiri dari kegiatan pengorganisasian, perencanaan, menggerakkan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran

yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

D. Pengertian Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan merupakan salah satu spesies dari manajemen, namun tidak demikian dalam arti manajemen dalam arti sempit sebang cabang ilmu ekonomi. Dalam arti manajemen seluas-luasnya, maka apa pun kata yang menempel di belakangnya adalah bagian atau bahkan sekedar embel-embel. Sondang P. Siagian (1989) mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

E. Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290). Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan. Koordinasi

menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas - tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organ.

F. Pengertian Kerjasama

Kerjasama merupakan proses sosial yang paling utama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Menurut Charles H. Cooley, kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama (Cooley, 1983).

Kerjasama bisa berupa pemberian bantuan maupun saling memberikan bantuan hal ini bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan. Selain dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok tertentu, kerjasama juga dilakukan antar negara. Hal ini berkenaan dengan hubungan diplomatik untuk menjaga perdamaian dunia secara lebih global.

G. Pembangunan

Siagian (2012:52) memberikan pengertian tentang pembangunan

sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Menurut Nasution (2004 : 82) mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya.

H. Manajemen Pembangunan

Manajemen pembangunan merupakan suatu sistem pembangunan yang dimulai dari sistem pengelolaan data dan informasi pendukung kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian pembangunan, sistem evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan.

I. Sumber Daya Manusia

Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor yang mutlak diperlukan dalam suatu organisasi, baik pada instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan atau usaha - usaha sosial untuk mendapatkan suatu balas jasa atau imbalan tertentu. Tenaga kerja dapat diartikan sebagai buruh, karyawan, pekerja, pegawai, pada hakekatnya mempunyai maksud yang sama.

J. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hall T. Douglas dan Goodale G. James (1986: 6) bahwa Manajemen sumber daya manusia adalah : “ *Human Resource Management is the process through which an optimal fit is achieved among the employee, job, organization, and environment so that employees reach their desired level of satisfaction and performance and the organization meets its goals*”. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui mana kesesuaian optimal di peroleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya.

K. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang berpengaruh juga terhadap semangat kerja. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Lingkungan kerja menurut Alex S, Nitisemito (1997: 25) adalah: “Segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas - tugas yang dibebankan”. Adapun pengertian lingkungan kerja yang dikemukakan oleh Kartini Kartono (1995:43) adalah: “Kondisi fisik materiil dan psikologis yang ada didalam perusahaan, dimana karyawan tersebut bekerja”. Kondisi materiil yaitu menyangkut ventilasi yang baik, sirkulasi udara, cahaya dan sebagainya. Sedang kondisi psikologis menyangkut hal - hal seperti kalimat

yang salah ucap, salah interpretasi, salah informasi, sugesti yang dipaksakan dan sebagainya.

3. Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

B. Jenis Penelitian

Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Desa Teluk Pauh Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, pemilihan infrastruktur jalan di Kecamatan Pangean karena dalam pembangunan jalan ini terjadi kendala yang dapat membuat pembatalan dalam pembuatan jalan karena dengan adanya pendekatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dan kepala daerah

dalam perundingan permasalahan dapat diselesaikan secara baik.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. Data tersebut berupa wawancara dengan BPD Kecamatan Pangean dan masyarakat mengenai permasalahan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Sumber data ini dapat diperoleh melalui data-data internal pada objek penelitian seperti berkas dokumentasi mengenai daftar kegiatan Bidang Bina Marga dalam Pembangunan Jalan. Kemudian data internal yang berasal dari studi keperpustakaan dengan mencari data melalui buku-buku, jurnal-jurnal, paper, media internet dan lain sebagainya.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan.

a. Informan

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat dalam Melaksanakan pekerjaan umum terhadap infrastruktur jalan di

Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.

Informan penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Teknik dalam pengambilan informan ini kemudian berkembang dengan purposive dengan tujuan agar data yang diperoleh secara komprehensif dan mendalam. Untuk itu dibutuhkan key informan atau informan kunci sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian.

No	Nama	Jabatan
1.	Juarlis	BPD Teluk Pauh
2.	Amril	Kepala Desa TP
3.	Erianto	Bid. Bina Marga
4.	Aswan	UPTD PU
5.	Mahviyen	Kep.Camat Pangean
6.	Disman	Tokoh Masyarakat

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2017

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau percakapan langsung dengan informan untuk keterangan yang diperlukan guna mengetahui komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, BPD, Kepala Desa Dan Tokoh Masyarakat.

2. Observasi

Melakukan kunjungan langsung dilokasi penelitian untuk mengumpulkan data terkait penelitian.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumentator yang terkait dengan kegiatan pembangunan jalan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah, BPD dan Kepala Desa Kecamatan Pangean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

G. Teknik Analisis Data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu (P. Joko Subagyo, 2004:94). Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen), yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. (Lexi J, Meleong, 2000:9).

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknis analisa data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan lapangan (baik berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain sebagainya) yang selanjutnya akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data Reduction (Reduksi data), yaitu bagian dari proses analisa dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. Data Display (Penyajian data), yaitu susunan yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. Conclusi Verification (Penarikan Kesimpulan), yaitu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat (Sugiyono,2012:20).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pembangunan Sarana Jalan Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan dan kegiatan masyarakat perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satunya pembangunan bidang sarana dan prasarana jalan. Karena dengan sarana jalan yang memadai secara tidak langsung penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan dan kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Disisi lain dapat memudahkan aksesibilitas penduduk dalam segala bentuk kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala pada masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Pangean (Teluk Pauh)

Menurut bapak Disman sebagai tokoh masyarakat yang turut andil dalam penyerahan sebagian lahannya untuk pembangunan jalan dan memberikan pendapatnya terhadap proses yang terjadi ketika lahan tanahnya akan digunakan pemerintah untuk pembangunan jalan. Secara umum menolaknya masyarakat dalam melepaskan tanah berkaitan dengan pendekatan kekeluargaan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat menilai bahwa pemerintah kurang mampu untuk meyakinkan manfaat dari pembangunan jalan kepada masyarakat yang akan di ambil tanahnya untuk pembangunan jalan tersebut. Di samping itu tanah masyarakat juga sudah dimanfaatkan untuk mata pencarian keluarga seperti perkebunan dan bertani yang sudah cukup lama mereka lakukan.

Menurut Bapak Juarlis ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berpendapat sama dengan informan sebelumnya bahwa pada pembangunan jalan didesa ini kurangnya komunikasi masyarakat desa dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan warga menolak untuk memberikan atau melepaskan tanahnya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Alasan masyarakat tanah tidak melepaskan tanah yang akan direlokasikan untuk pembangunan jalan karena tanah tersebut merupakan mata

pencaharian dari masyarakat desa Teluk Pauh.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Amril bahwa pemerintah tidak menjelaskan secara jelas pada manfaat pembangunan jalan ini yang mengakibatkan keresahan pada masyarakat untuk mau melepaskan tanahnya sebab tanah ini ada milik pribadi dan ada juga milik adat di kecamatan Pangean. Tanah milik pribadi dan adat sama-sama digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat, untuk tanah adat atau tanah milik keluarga akan membutuhkan waktu yang sedikit lama dilepaskan karena tanah milik bersama harus dirembuk atau didiskusikan dengan keluarga.

Bapak Mahviyen Trikon Putra, SE Kepala Camat Pangean juga berpendapat sama dengan informan sebelumnya bahwa terhambatnya pembangunan infrastruktur jalan dikarenakan kurangnya komunikasi kepada masyarakat. Komunikasi sangat perlu dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman yang akan timbul akibat ketidaktahuan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini pihak pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Seperti yang dikatakan Bapak Erianto ST Bidang Bina Marga, diperoleh informasi bahwa masyarakat teluk pauh yang tidak mau melepaskan tanahnya untuk pembangunan jalan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat yang rata-rata pendidikan masyarakat tamatan SMP-SMA sederajat. Selain itu ekonomi masyarakat yang tergolong menengah kebawah membuat masyarakat lebih

mementingkan mencari nafkah untuk keluarga dari pada harus menyerahkan tanah mereka untuk pembangunan jalan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Aswan S.Sos ST kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum mengutarakan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi pada saat awal pembangunan jalan, yaitu masyarakat tidak mau menyerahkan tanah milik mereka untuk dilakukannya pembangunan jalan dikarenakan tanah milik mereka sudah dijadikan kebun sebagai mata pencaharian keluarga. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi dengan masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat pembangunan jalan.

Dapat disimpulkan bahwa faktor kendala umumnya dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam mengkomunikasikan manfaat, perencanaan, proses, dan hasil dari pembangunan jalan. Sedangkan faktor pendukungnya juga dipengaruhi oleh baiknya komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini keluarga, perangkat desa, maupun tokoh masyarakat setempat dalam menyampaikan tujuan serta hasil yang akan diperoleh dari suksesnya pembangunan jalan yang akan direalisasikan.

Di berbagai pelosok tanah air masih terdapat ribuan daerah pedesaan yang sangat timpang keadaannya dibandingkan dengan kota yang lengkap akan sumber daya. Maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat kita lihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi

termasuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya.

Infrastruktur jalan merupakan sarana dalam perkembangan ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi sangat sulit dicapai. Hal ini akan berakibat pada proses pembangunan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik dan masyarakat mengalami kesulitan untuk malakukan berbagai proses transaksi antar desa ke desa maupun desa dengan kota. Namun hal ini mulai mendapat respon yang sangat baik dari kalangan pemerintah. Maka dengan hal tersebut, pemerintah semakin memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan demikian jalan sebagai modal ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai modal dalam masalah yang dihadapi masyarakat. Walaupun pada awalnya masyarakat tidak begitu mengerti akan manfaat pembangunan jalan. Saat ini adalah taraf ekonomi yang masih tergantung pada infrastruktur jalan darat, karena hanya jalan darat yang dapat menghubungkan antara desa dengan desa maupun desa dengan kota. Oleh karena itu pemerintah dapat

memperhatikan pembangunan jalan dengan demikian dapat menunjang perekonomian masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Pangean (Teluk Pauh)

Menurut bapak Disman hal pertama yang menjadikan masyarakat mau melepaskan tanah yang mereka miliki dikarenakan pendekatan pemerintah yang mampu menjelaskan manfaat dari hasil pembangunan jalan. Pembangunan jalan dirasakan dapat memudahkan akses dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga kemajuan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

Seperti yang dikatakan bapak Juwalis kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) diperoleh informasi bahwa kemauan masyarakat menyerahkan tanahnya karena pemerintah telah berkomunikasi dengan masyarakat dan masyarakat telah mengetahui banyak manfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan jalan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari komunikasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Amril Kepala Desa Teluk Pauh, diperoleh informasi bahwa Pembangunan jalan di kecamatan Pangean ini memiliki tujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam akses jalan dan juga memiliki tujuan dapat mempersingkat waktu perjalanan dari desa ke kota. Serta dapat meningkatkan

hasil produksi atau perekonomian masyarakat.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Mahviyen Trikon Putra, SE kepala camat Pangean bahwa suksesnya pembangunan infrastruktur jalan dikarenakan terjalannya komunikasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Komunikasi memiliki banyak manfaat diantaranya kurangnya kesalahpahaman yang akan terjadi, terjalannya kekeluargaan yang erat, dan mendapatkan informasi yang akurat.

Menurut bapak Erianto, ST Bidang Bina Marga mengungkapkan bahwa pembangunan jalan ini memiliki tujuan untuk dapat memudahkan perjalanan masyarakat dari desa ke kota dan memudahkan para petani dalam usahanya, meningkatkan harga tanah dan membuka banyak peluang usaha baru seperti membuka warung-warung.

Menurut bapak Aswan S.Sos ST kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum mengutarakan bahwa pembangunan jalan bertujuan sebagai penunjang alat transportasi bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Teluk Pauh, transportasi memiliki andil yang cukup kuat dan andil yang sangat besar dalam tatanan kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan pada bidang lain-lainnya

Manfaat dari pembangunan jalan tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan usaha masyarakat di desa Teluk Pauh dengan

membuka peluang usaha lain selain dari pertanian dan berkebun. Banyak usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti membuka warung, menjual jajanan anak, dll. Pembangunan jalan tersebut juga akan memudahkan akses jalan untuk anak-anak menuju sekolah, masyarakat lebih kreatif dalam memanfaatkan sarana jalan yang telah di bangun seperti membuat kerajinan dan menjualnya baik di sepanjang jalan tersebut maupun di pasarkan ke daerah lain dan dengan adanya sarana jalan yang sudah baik masyarakat akan lebih mudah menuju ke desa lain jika ada keperluan yang mendadak, pada akhirnya sarana jalan yang baik akan mampu mengembangkan desa Teluk Pauh yang lebih maju dalam berbagai bidang.

Maka pemerintah harus mampu membangun sarana infrastruktur jalan yang dapat mendukung jalannya roda pertumbuhan bagi ekonomi masyarakat. Karena itu, perekonomian dapat dipandang baik jika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan efisien dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal, oleh sebab itu pembangunan infrastruktur jalan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam menopang aktivitas transaksi jual beli hasil pertanian bahkan hasil alam lainnya yang ada di Kecamatan Pangean terutama desa Teluk Pauh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan hasil analisis dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum masyarakat menerima untuk melepaskan tanahnya berkaitan dengan pendekatan kekeluargaan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat menilai bahwa pemerintah mampu meyakinkan manfaat dari pembangunan jalan kepada masyarakat yang akan di ambil tanahnya untuk pembangunan jalan tersebut. Di samping itu tanah masyarakat juga sudah dimanfaatkan untuk mata pencarian keluarga seperti perkebunan yang sudah cukup lama mereka lakukan.
2. Faktor pendukung dalam pembangunan jalan di desa Teluk Pauh adalah sudah baiknya komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa. Selain itu pemerintah juga mampu menjelaskan manfaat baik dari pembangunan jalan seperti kemudahan akses yang dijanjikan pemerintah kepada masyarakat sekitar, perbaikan ekonomi masyarakat, juga hal-hal lain yang terkait dengan proses dan hasil pembangunan jalan. Di samping itu, adanya partisipasi aktif masyarakat menjadikan hasil dari pembangunan jalan sangat signifikan. Partisipasi aktif yang ditunjukkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil pembangunan jalan sangat membantu pemerintah secara moril,

sehingga hasil dari partisipasi masyarakat mampu mensukseskan hasil pembangunan jalan secara fisik maupun sosial.

B. SARAN

Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan jalan sehingga keberhasilan pembangunan jalan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Adapun saran yang diajukan oleh penulis adalah pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat terkait proses pembangunan jalan yang melibatkan banyak pihak dengan metode-metode yang tepat dalam pendekatan kekeluargaan sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan menerima setiap rencana baik dari pemerintah yang ingin bersama-sama membangun fisik, ekonomi serta sosial dari pembangunan jalan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan jalan ini diharapkan mampu menjaga dan merawat hasil pembangunan jalan sehingga akan berdampak baik pada jalan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang, serta pemerintah harus lebih terbuka dan siap bertanggungjawab dalam setiap masalah yang disampaikan masyarakat. Bagi perangkat desa diharapkan mampu memberikan pengawasan kepada masyarakat dalam merawat jalan, selain itu pemerintah desa lebih memaksimalkan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan

sumber daya alam yang berdampak pada peningkatan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar serta dukungan akses jalan yang baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Lexy J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Sondag, Siagian P. 2012. *Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Zulkarimen. 2009. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nitisemito, Alex S. 2010. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartini. Kartono. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Charles, H Cooley. 1983. *Social Organization: a study of the larger mind*. Transaction Publishers.

Douglas, Hall T. dan Goodale, James. 1986. *Human Resources Management, Strategy. Design and Implementation*, Glenview: Scott Foresman and Company.

